

HUKUM TATA NEGARA

**PENERAPAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD KOTA PASURUAN
TERHADAP KREDIT MACET DI PT BPR KOTA PASURUAN**

(Studi di DPRD Kota Pasuruan)

SKRIPSI

Program Sarjana

Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

MUHAMMAD IMAM ABADI

NPM. 2074201001487

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2024

HUKUM TATA NEGARA

**PENERAPAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD KOTA PASURUAN
TERHADAP KREDIT MACET DI PT BPR KOTA PASURUAN**

(Studi di DPRD Kota Pasuruan)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1

Program Sarjana

Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

MUHAMMAD IMAM ABADI

NPM. 2074201001487

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2024

Lembar Pengesahan

Skripsi ini telah disetujui
Tanggal : 20 Juli 2024



Oleh :

Pembimbing I

Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum

Pembimbing II

Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

**PENERAPAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD KOTA PASURUAN
TERHADAP KREDIT MACET DI PT BPR KOTA PASURUAN**
(Studi di DPRD Kota Pasuruan)

Dipersiapkan dan disusun oleh :

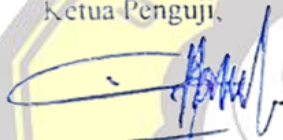
MUHAMMAD IMAM ABADI

NPM. 2074201001487

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal : 9 Juli 2024

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji,



Wiwin Ariesta, S.H., M.H.

Anggota Dewan Penguji,



Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

Sekretaris Penguji,



Dr. Rohny Winarno, S.H., M.Hum

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar sarjana

Tanggal : 20 Juli 2024

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Merdeka Pasuruan



Mudhja Ismail, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat daerah.. Tentu salah satu penyelenggara pemerintahan daerah di Negara Republik Indonesia adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Pasuruan. Kota Pasuruan adalah salah satu kota yang termasuk dalam wilayah administratif provinsi Jawa Timur. Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Pasuruan dilaksanakan oleh Walikota Pasuruan selaku Kepala Daerah yang berwenang di ranah eksekutif dan juga dilaksanakan oleh DPRD sebagai lembaga yang berwenang di legislatif. Yang termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Pasuruan adalah penyelenggaraan PT BPR Kota Pasuruan sebagai BUMD di Kota Pasuruan. Sebagai BUMD PT BPR Kota Pasuruan tentu memiliki modal yang berasal dari APBD Kota Pasuruan. Dari sebab inilah PT BPR Kota Pasuruan menjadi salah satu pihak yang diawasi oleh DPRD Kota Pasuruan dalam penyelenggaraannya dan keberadaan PT BPR Kota Pasuruan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perusahaan Perseoran Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan, sebagai BUMD di Kota Pasuruan PT BPR Kota Pasuruan juga dikuatkan keberadaannya dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Berdasarkan hal yang telah disebutkan di atas, permasalahan yang dijadikan kajian dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Pasuruan terhadap kredit macet di PT BPR Kota Pasuruan berkaitan dengan dana APBD ? dan bagaimana optimalisasi fungsi pengawasan DPRD Kota Pasuruan terhadap kredit macet di PT BPR Kota Pasuruan berkaitan dengan dana APBD ?

Dari penelitian skripsi ini dapat diketahui bahwasannya pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Pasuruan terhadap kredit macet di PT BPR Kota Pasuruan berkaitan dengan dana APBD telah sesuai dengan Pasal 153 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pengawasan dilakukan dengan berbagai metode seperti *hearing* bersama, sidak lapangan, studi tiru dan memberikan berbagai masukan yang konstruktif terhadap PT BPR Kota Pasuruan. Optimalisasi fungsi pengawasan DPRD Kota Pasuruan terhadap kredit macet di PT BPR Kota Pasuruan berkaitan dengan dana APBD menunjukkan hasil yang optimal, dapat ditinjau daripada masukan DPRD Kota Pasuruan terhadap PT BPR Kota Pasuruan yang banyak diakomodir dan dilaksanakan oleh PT BPR Kota Pasuruan dalam upaya untuk meningkatkan keuntungan yang berefek terhadap naiknya sumbangsih PAD PT BPR Kota Pasuruan sebagai BUMD terhadap Pemerintah Daerah Kota Pasuruan.

Kata Kunci : Pengawasan, DPRD dan BPR.

PERNYATAAN
ORISINALITAS SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 20 Juli 2024

Penulis

MUHAMMAD IMAM ABADI
NPM : 2074201001487

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat serta karuniaNya, sehingga skripsi yang berjudul **PENERAPAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD KOTA PASURUAN TERHADAP KREDIT MACET DI PT BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA PASURUAN (Studi di DPRD Kota Pasuruan)** dapat terselesaikan. Tidak lupa *sholawat* serta salam selalu tucurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan yang terang benderang.

Dalam kesempatan ini, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat sebagai acuan untuk penelitian berikutnya dan bermanfaat bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam bidang akademis maupun non-akademis. Penyusunan skripsi guna untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Penulis menyadari keterbatasan waktu dan ilmu pengetahuan yang dimiliki menyebabkan penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diperlukan guna menyempurnakan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat, ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan, Ibu Dr. Ir. Sulistyawati, M.P
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, Bapak Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.sekaligus dosen pembimbing II
3. Bapak Dr. Ronny Winarno, S.H, M.Hum. selaku dosen pembimbing I yang telah membagikan ilmunya dan membimbing dengan penuh perhatian, tulus

dan ikhlas memberikan arahan, saran, nasehat, serta bimbingan selama penyusunan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau.

4. Ibu Wiwin Ariesta, S.H., M.H. Selaku Dosen Penguji penulis, yang senantiasa ikhlas memberikan arahan, saran, nasehat, serta pendampingan selama penyusunan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau.
5. Bapak Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.H. Selaku Dosen Wali Penulis, yang senantiasa menjadi dosen wali yang baik selama penulis menjadi mahasiswa di Universitas Merdeka Pasuruan.
6. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen serta seluruh karyawan dan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, penulis ucapkan terima kasih atas bimbingan dan pendidikan serta tuntunannya.
7. Ayah penulis H.Akhmad Akhyar, M.Pd.I, M.H. (Alm) dan ibu penulis (ibu Hj. Miftahul Jannah, S.E, M.A.P. beserta kakak penulis drg. Muhammad Putra Nahdlah, M.Kes yang senantiasa mendoakan, melimpahkan kasih sayang serta memberi semangat kepada penulis.
8. Wakil Ketua 1 sekaligus Koordinator Komisi 2 DPRD Kota Pasuruan 2019-2024, Bapak Dedy Tjahjo Poernomo, S.H, M.A.P. beserta seluruh Anggota Komisi 2 DPRD Kota Pasuruan yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Direktur Utama PT BPR Kota Pasuruan (Perseroda) Ibu Iswinarti Margiana, S.E. yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Seluruh pihak yang turut serta memberikan dukungan kepada penulis baik secara moril ataupun materiil kepada penulis.

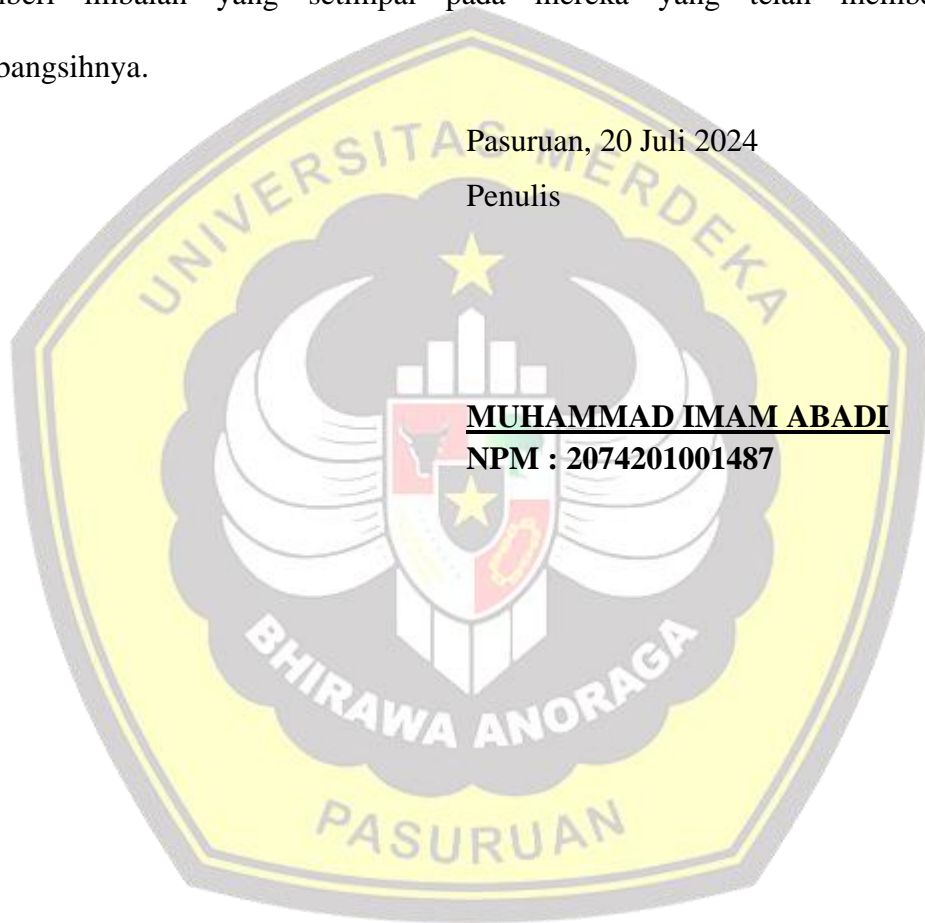
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena keterbatasan waktu dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis, maka penulis menghargai adanya kritik dan saran yang dapat membangun. Semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT memberi imbalan yang setimpal pada mereka yang telah memberikan sumbangsinya.

Pasuruan, 20 Juli 2024

Penulis

MUHAMMAD IMAM ABADI

NPM : 2074201001487



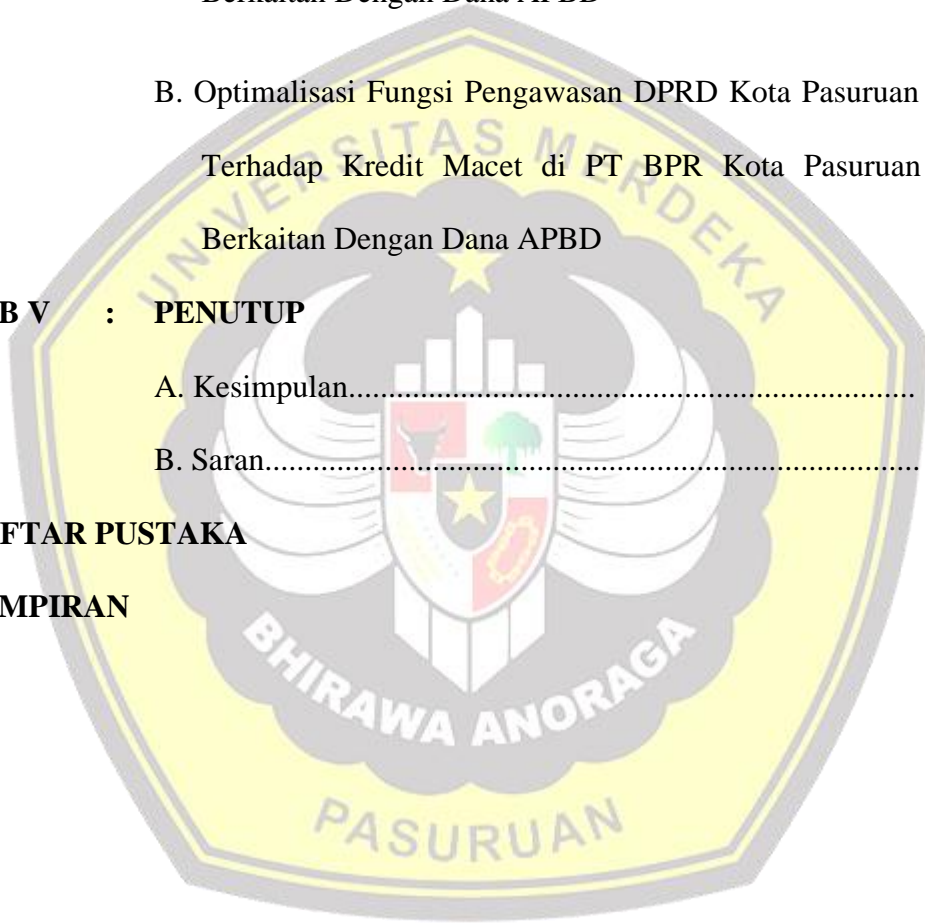
DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR SKEMA	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan	10
1. Pengertian Mengenai Pengawasan	10
2. Asas, Tujuan, Manfaat Dan Teori Pengawasan	12
3. Bentuk-Bentuk Pengawasan Khususnya Yang Dilakukan DPRD Dan Pengaturannya	19

B. Tinjauan Umum Tentang DPRD	22
1. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	22
2. Peran, Fungsi Dan Pengaturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	24
3. Tugas, Wewenang, Hak Dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	30
C. Tinjauan Umum Tentang PT BPR Kota Pasuruan	35
1. Pengertian PT BPR Kota Pasuruan Dan Pengaturannya.....	35
2. Tugas, Fungsi, Asas Dan Ruang Lingkup Kinerja PT BPR Kota Pasuruan Berkenaan Dengan APBD.....	40
3. Urgensi PT BPR Kota Pasuruan Dan Aspek Hukumnya Berkenaan Dengan APBD.....	44
BAB III : METODE PENELITIAN	48
A. Perspektif Pendekatan Penelitian	48
B. Ruang Lingkup Penelitian	49
C. Jenis dan Sumber Data.....	50
D. Lokasi Penelitian.....	51
E. Populasi Dan Teknik Pengambilan Sampel	51
F. Teknik Pengumpulan Data.....	52
G. Teknik Analisis Data.....	53

BAB IV	:	PENERAPAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD KOTA PASURUAN TERHADAP KREDIT MACET DI PT BPR KOTA PASURUAN (Studi di DPRD Kota Pasuruan)	54
		A. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kota Pasuruan Terhadap Kredit Macet di PT BPR Kota Pasuruan Berkaitan Dengan Dana APBD	54
		B. Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Kota Pasuruan Terhadap Kredit Macet di PT BPR Kota Pasuruan Berkaitan Dengan Dana APBD	68
BAB V	:	PENUTUP	76
		A. Kesimpulan.....	77
		B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA			
LAMPIRAN			



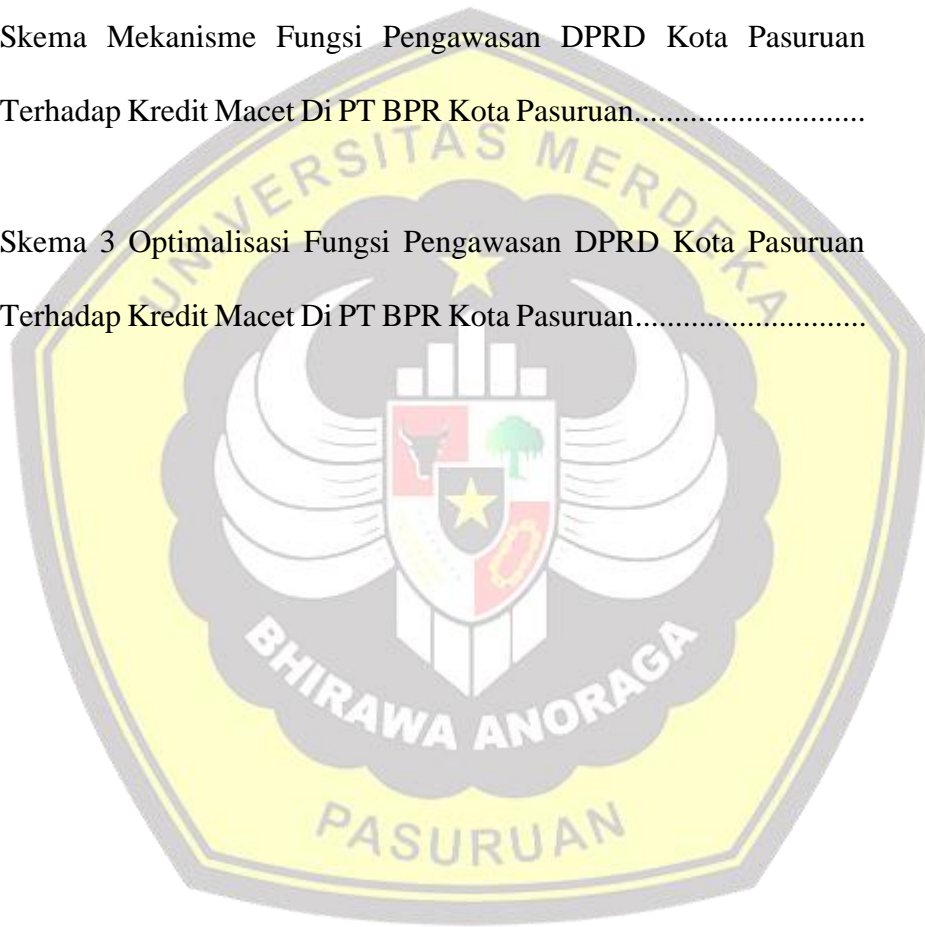
DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1 Komposisi DPRD Kota Pasuruan Periode 2019-2024.....	58



DAFTAR SKEMA

Skema	Halaman
1. Skema 1 Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kota Pasuruan Terhadap Kredit Macet Di PT BPR Kota Pasuruan.....	67
2. Skema Mekanisme Fungsi Pengawasan DPRD Kota Pasuruan Terhadap Kredit Macet Di PT BPR Kota Pasuruan.....	68
3. Skema 3 Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Kota Pasuruan Terhadap Kredit Macet Di PT BPR Kota Pasuruan.....	75



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi
4. Surat Keterangan Izin Penelitian
5. Daftar Pertanyaan Untuk Narasumber Dari Komisi 2 DPRD Kota Pasuruan
6. Daftar Pertanyaan Untuk Narasumber Dari PT BPR Kota Pasuruan

